

**RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,      September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

SAMSUL HADI, S.Sos., M.T  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606051986071002

---

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2020 ..	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020 .....	11
dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo .....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan .....	72
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	76
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	87
2.6 Inovasi Perangkat Daerah .....	87
2.7 Penghargaan .....	90
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	91
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	91
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo .....	96
3.3 Program dan Kegiatan .....	98
BAB IV. PENUTUP .....	110

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020 & Capaian Renstra s.d Tahun 2020
- Tabel 2.2 : Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.3 : Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.4 : Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
- Tabel 2.5 : PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.6 : Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020
- Tabel 2.7 : Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.8 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016-2020
- Tabel 2.9 : Predikat Indeks SPBE
- Tabel 2.10 : Indeks SPBE Kabupaten Tahun 2016-2020
- Tabel 2.11 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.12 : Nilai Pemingkatan Badan Publik Tahun 2019
- Tabel 2.13 : Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.14 : Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.15 : Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.16 : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.17 : Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran
- Tabel 2.18 : LPP di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.19 : Area Publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2016-2020
- Tabel 2.20 : Lokasi area publik Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.21 : Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.22 : Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.23 : Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.24 : Sistem Informasi yang Terintegrasi
-

- Tabel 2.25 : Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.26 : Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Tahun 2020
- Tabel 2.27 : Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.28 : Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.29 : Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.30 : Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.31 : Hasil *TT Security Assesment* oleh BSSN di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.32 : Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022
- Tabel 2.33 : Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Tabel 2.34 : Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2021
- Tabel 2.35 : Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2021
- Tabel 3.1 : Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo
- Tabel 3.3 : Perbandingan Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022
- Tabel 3.4 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

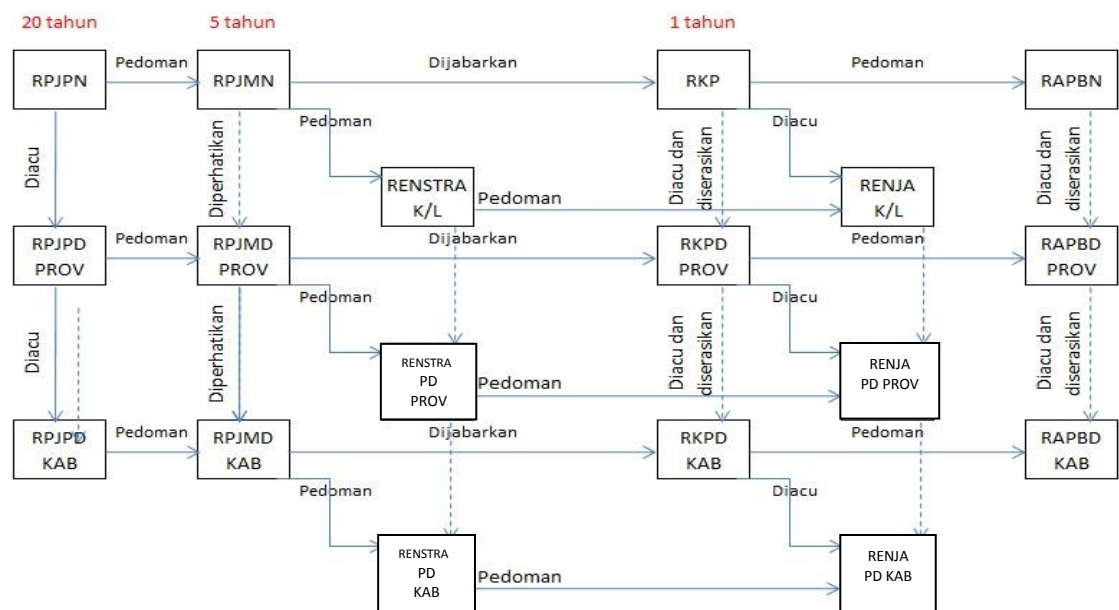
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi

serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinkominfo Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

### Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

#### a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:



- 1) Kondisi pelayanan Dinkominfo;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinkominfo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai Renstra Dinkominfo;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan;
- 8) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- 9) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 10) Data Pokok Perencanaan Dinkominfo;
- 11) Informasi lain terkait pelayanan informasi publik.

**b. Analisis gambaran pelayanan Dinkominfo;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinkominfo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinkominfo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinkominfo untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020, dan perkiraan realisasi Tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan Tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinkominfo.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun 2020 berdasarkan Renstra Dinkominfo;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinkominfo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinkominfo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinkominfo dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan informasi publik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan informasi publik;
  - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;
  - 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
-

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinkominfo;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinkominfo. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

**g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran

pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo;**

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, serta inovasi teknologi, politik, hukum, dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo;**

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

---

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah;**

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
-

Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 5;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89);

32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2020

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV. PENUTUP

---



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2020**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinkominfo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020  
& Capaian Renstra s.d Tahun 2020

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>BELANJA</b>					50.134.580.844		7.165.771.226		8.458.542.568	6.387.768.616		6.263.486.474				13.429.257.700			
<i>Belanja Tidak Langsung</i>					16.297.274.844		2.407.967.071		3.064.542.568	2.909.896.766		2.834.198.788				5.242.165.859			
A	Belanja Pegawai				16.297.274.844		2.407.967.071		3.064.542.568	2.909.896.766		2.834.198.788				5.242.165.859			
1	Gaji dan Tunjangan				16.297.274.844		2.407.967.071		3.064.542.568	2.909.896.766		2.834.198.788				5.242.165.859			
<i>Belanja Langsung</i>					33.837.306.000		4.757.804.155		5.394.000.000	3.477.871.850		3.429.287.686				8.187.091.841			
A	URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.496.150.000		3.760.137.071		4.192.150.000	2.872.872.600		2.846.672.746				6.606.809.817			
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				2.484.150.000		523.375.788		654.150.000	224.539.600		221.849.874		98,80		745.225.662		30,00	
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20		11,34		12			13,20		100		13,20		66,00		
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30		15,63		15			15,63		100		15,63		52,10		
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100		100		100			100		100		100		100		
a	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya diseminasi informasi kepada masyarakat melalui kesenian tradisional	kegiatan	13	275.000.000	6	79.125.000	0	65.000.000	2.918.000	-	2.918.000	-	100	6	82.043.000	46,15	29,83	
b	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	terlaksananya pembinaan lembaga penyiaran , peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	kegiatan	8	129.000.000	3	40.125.925	0	30.000.000	188.000	-	188.000	-	100	3	40.313.925	37,50	31,25	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat khususnya UMKM, peningkatan taraf perekonomian UMKM dan masyarakat	kegiatan	60	505.000.000	12	163.143.462	12	175.000.000	44.066.400	12	44.044.330	100	99,95	24	207.187.792	40,00	41,03	
d	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	kegiatan	604	197.650.000	124	62.158.414	60	41.650.000	29.249.200	54	29.227.130	90,00	99,92	178	91.385.544	29,47	46,24	
e	Pelayanan Informasi Publik	terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	bulan	60	400.000.000	12	61.756.664	12	100.000.000	63.110.200	12	60.508.746	100	95,88	24	122.265.410	40,00	30,57	
f	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	peningkatan peran KIM dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	KIM	62	600.000.000	32	26.097.200	33	150.000.000	4.151.000	33	4.151.000	100	100	65	30.248.200	100	5,04	
g	Fasilitasi Pengembangan Media Center	tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui media center	bulan	60	377.500.000	12	90.969.123	12	92.500.000	80.856.800	12	80.812.668	100	99,95	24	171.781.791	40,00	45,51	
	<b>Total Program</b>				<b>2.484.150.000</b>		<b>523.375.788</b>		<b>654.150.000</b>	<b>224.539.600</b>		<b>221.849.874</b>				<b>745.225.662</b>			
2	<b>Program pengelolaan aplikasi informatika</b>				<b>22.012.000.000</b>		<b>3.236.761.283</b>		<b>3.538.000.000</b>	<b>2.648.333.000</b>		<b>2.624.822.872</b>		<b>99,11</b>		<b>5.861.584.155</b>		<b>26,63</b>	
		<b>Persentase ketersediaan akses internet publik</b>	%	<b>100</b>		<b>68,33</b>		<b>90</b>			<b>71,66</b>		<b>79,62</b>		<b>71,66</b>		<b>71,66</b>		
		<b>Persentase ketersediaan jaringan intranet</b>	%	<b>100</b>		<b>80,25</b>		<b>100</b>			<b>82,03</b>		<b>82,03</b>		<b>82,03</b>		<b>82,03</b>		
		<b>Persentase sistem informasi yang terintegrasi</b>	%	<b>50</b>		<b>13,17</b>		<b>20</b>			<b>16,20</b>		<b>81,00</b>		<b>16,20</b>		<b>32,40</b>		
		<b>Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal</b>	%	<b>60</b>		<b>40,13</b>		<b>45</b>			<b>52,27</b>		<b>100</b>		<b>52,27</b>		<b>87,12</b>		
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi Integrasi Sistem Informasi	Aplikasi	470	655.000.000	456	274.249.800	456	385.000.000	305.180.200	500	294.895.422	100	96,63	456	569.145.222	97,02	86,89	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
b	Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung	pa ket	5	2.700.000.000	1	143.555.078	1	130.000.000	122.981.400	1	122.534.200	100	100	2	266.089.278	40,00	9,86	
c	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Pa ket	5	5.780.000.000	1	191.909.700	0	110.000.000	1.271.500	-	1.271.500	-	100	1	193.181.200	20,00	3,34	
d	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	bul an	60	375.000.000	12	193.481.850	12	150.000.000	113.897.200	12	113.795.700	100	100	24	307.277.550	40,00	81,94	
e	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan backup server	De sa	150	2.217.000.000	68	508.253.100	1	875.000.000	467.380.800	2	465.566.694	100	99,61	70	973.819.794	46,67	43,93	
f	Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD, Desa se Kabupaten Temanggung	IP	463	985.000.000	425	106.608.500	425	98.000.000	67.995.800	425	60.576.000	100	89,09	425	167.184.500	91,79	16,97	
g	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	bul an	60	600.000.000	12	87.610.431	12	90.000.000	82.866.800	12	82.854.730	100	99,99	24	170.465.161	40,00	28,41	
h	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/ kelurahan dan internet publik (e-Government)	mb ps	4350	8.700.000.000	550	1.731.092.824	750	1.700.000.000	1.486.759.300	800	1.483.328.626	100	99,77	1.350	3.214.421.450	31,03	36,95	
	<b>Total Program</b>				<b>22.012.000.000</b>		<b>3.236.761.283</b>		<b>3.538.000.000</b>	<b>2.648.333.000</b>		<b>2.624.822.872</b>				<b>5.861.584.155</b>			
<b>B</b>	<b>URUSAN : STATISTIK</b>				<b>3.540.656.000</b>		<b>426.550.828</b>		<b>475.000.000</b>	<b>239.806.200</b>		<b>239.011.508</b>				<b>665.562.336</b>			

	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program pengembangan data Statistik				3.540.656.000		426.550.828		475.000.000	239.806.200		239.011.508		99,67		665.562.336		18,80	
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100		100		100			100		100		100		100,0		
a	Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (IHK, NTP dan Buku PDRB Kecamatan)	do k	3	550.000.000	3	160.931.500	3	200.000.000	101.887.000	3	101.834.000	100	99,95	6	262.765.500	100	47,78	
b	Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan Inkesra	Do ku me n	10	1.525.000.000	2	112.015.608	2	110.000.000	36.174.200	1	36.260.000	50,00	100,24	3	148.275.608	30,00	9,72	
c	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten temanggung	Do ku me n	5	1.145.000.000	1	94.373.700	1	100.000.000	65.168.500	1	65.099.100	100	100	2	159.472.800	40,00	13,93	
d	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (sumber data dari OPD)	OP D	30	320.656.000	30	59.230.020	12	65.000.000	36.576.500	12	35.818.408	100	97,93	42	95.048.428	100	29,64	
	<b>Total Program</b>				<b>3.540.656.000</b>		<b>426.550.828</b>		<b>475.000.000</b>	<b>239.806.200</b>		<b>239.011.508</b>				<b>665.562.336</b>			
<b>C</b>	<b>URUSAN : PERSANDIAN</b>				<b>1.450.000.000</b>		<b>171.409.777</b>		<b>165.000.000</b>	<b>46.333.550</b>		<b>45.489.502</b>				<b>216.899.279</b>			
1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				1.450.000.000		171.409.777		165.000.000	46.333.550		45.489.502		98,18		216.899.279		14,96	
		tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1		1		1			0		43,00		0,43		43		
a	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	PD	27	1.450.000.000	24	171.409.777	27	165.000.000	46.333.550	27	45.489.502	100	98,18	51	216.899.279	100	14,96	
	<b>Total Program</b>				<b>1.450.000.000</b>		<b>171.409.777</b>		<b>165.000.000</b>	<b>46.333.550</b>		<b>45.489.502</b>							

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH				4.350.500.000		399.706.479		561.850.000	318.859.500		298.113.930				697.820.409			
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	32.500.000	100	4.982.000	100	5.000.000	5.000.000	100	4.996.600	100	99,93	100	9.978.600	100	30,70	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, dan RFK) + Renstra	Dokumen	167	32.500.000	34	4.982.000	33	5.000.000	5.000.000	33	4.996.600	100	99,93	67	9.978.600	40,12	30,70	
	<b>Total Program</b>				<b>32.500.000</b>		<b>4.982.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>4.996.600</b>							
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	2.622.500.000	100	245.240.404	100	243.000.000	185.047.500	100	177.762.329		96,06	100	423.002.733	100	16,13	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Bulan	60	127.500.000	12	5.816.834	12		8.400.000	12	5.365.793	100	63,88	24	11.182.627	40,00	8,77	
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Bulan	60	129.000.000	12	3.988.900	12	5.000.000	5.000.000	12	4.994.400	100	99,89	24	8.983.300	40,00	6,96	
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya dan tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	bulan	60	74.500.000	12	15.000.000	12	15.000.000	14.000.000	12	13.993.200	100	99,95	24	28.993.200	40,00	38,92	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	bulan	60	67.500.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12.000.000	12	11.856.750	100	98,81	24	21.856.750	40,00	32,38	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	bulan	60	69.000.000	12	9.412.800	12	12.000.000	8.200.000	12	7.897.500	100	96,31	24	17.310.300	40,00	25,09	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	bulan	60	19.000.000	12	2.640.000	12	3.000.000	3.000.000	12	2.640.000	100	88,00	24	5.280.000	40,00	27,79	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	undangan																		
g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bul an	60	145.000.000	12	34.403.650	12	35.000.000	24.750.000	12	22.292.300	100	90,07	24	56.695.950	40,00	39,10	
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bul an	60	310.000.000	12	74.991.298	12	75.000.000	23.698.000	12	23.687.000	100	99,95	24	98.678.298	40,00	31,83	
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bul an	60	61.000.000	12	14.985.000	12	16.000.000	16.000.000	12	15.992.000	100	99,95	24	30.977.000	40,00	50,78	
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya keg. administrasi perkantoran dan kebersihan kantor	bul an	60	1.620.000.000	12	74.001.922	12	70.000.000	69.999.500	12	69.043.386	100	98,63	24	143.045.308	40,00	8,83	
	<b>Total Program</b>				<b>2.622.500.000</b>		<b>245.240.404</b>		<b>243.000.000</b>	<b>185.047.500</b>		<b>177.762.329</b>				<b>423.002.733</b>			
<b>3</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.670.500.000</b>	<b>100</b>	<b>149.484.075</b>	<b>100</b>	<b>301.350.000</b>	<b>117.850.000</b>	<b>100</b>	<b>104.394.637</b>	<b>100</b>	<b>88,58</b>	<b>100</b>	<b>253.878.712</b>	<b>100</b>	<b>15,20</b>	
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	pa ket	18	750.000.000	3	26.800.000	7	100.000.000	0	-	-	-	-	3	26.800.000	16,67	3,57	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	pa ket	16	445.000.000	3	48.815.950	3	75.000.000	0	-	-	-	-	3	48.815.950	18,75	10,97	
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bul an	60	135.000.000	12	14.155.000	12	25.000.000	25.000.000,00	12	23.906.845	100	95,63	24	38.061.845	40,00	28,19	
d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan, pembelian bbm dan penggantian sukucadang kendaraan dinas	bul an	60	275.000.000	12	49.725.125	12	71.350.000	71.350.000,00	12	60.520.792	100	84,82	24	110.245.917	40,00	40,09	
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	bul an	60	45.500.000	12	9.988.000	12	10.000.000	5.500.000,00	12	4.070.000	100	74,00	24	14.058.000	40,00	30,90	
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Terlaksananya pemeliharaan alat kantor	bul an	60	20.000.000	0	-	12	20.000.000	16.000.000,00	12	15.897.000	100	99,36	12	15.897.000	20,00	79,49	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat .	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALIASI 2020		CAPAIAN 2020		REALIASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	kantor																		
	<b>Total Program</b>				1.670.500.000		149.484.075		301.350.000	117.850.000		104.394.637				253.878.712			
4	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	25.000.000	100	-	100	12.500.000	10.962.000	100	10.960.364	100	99,99	100	10.960.364	100	43,84	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai	orang	56	25.000.000	0	-	29	12.500.000	10.962.000	27	10.960.364	93,10	100	27	10.960.364	48,21	43,84	
	<b>Total Program</b>				25.000.000		-		12.500.000	10.962.000		10.960.364				10.960.364			



Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkominfo di tahun 2020 maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra
  - b. Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo
  - c. Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif
  - d. Pelayanan Informasi Publik
  - e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika
  - f. Fasilitasi Pengembangan Media Center
  - g. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
  - h. Pengadaan Jaringan Komunikasi
  - i. Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik
  - j. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi
  - k. Pengembangan internet pedesaan dan data centre
  - l. Pengelolaan Domain dan Sub domain
  - m. Pengelolaan Data Centre
  - n. Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD
  - o. Penyusunan Statistik Ekonomi
  - p. Penyusunan Statistik Daerah
  - q. Pengelolaan Bank Data Pembangunan
  - r. Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi
  - s. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
  - t. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - u. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - v. Penyediaan alat tulis kantor
  - w. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - x. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- y. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- z. Penyediaan makanan dan minuman
  - aa. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - bb. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - cc. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
  - dd. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - ee. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - ff. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - gg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP
  - b. Penyusunan Statistik Sosial

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,11%**,. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik;  
Capaian kinerja : 100 % kategori baik
2. Terwujudnya pengelolaan SPBE;  
Capaian kinerja : 88,46 % kategori baik

Pengelolaan SPBE tercapai 88,46% dari target 100% dikarenakan pada tahun 2020 dilakukan refocusing anggaran 2 (dua) tahap untuk penanganan pandemi COVID-19 di Temanggung yang mengakibatkan alokasi pengadaan peralatan jaringan untuk penyediaan akses internet publik dikurangi. Di sisi lain dengan adanya pandemi COVID-19, sesuai kebijakan pembatasan kegiatan sosial dan pembatasan kegiatan di luar, dilakukan kebijakan penonaktifan akses internet publik untuk mengurangi resiko

---

kerumunan di sekitar hotspot area. Atas dasar itu juga, Dinas Kominfo tidak melakukan penambahan titik lokasi internet publik.

Selain itu belum tercapainya target ketersediaan jaringan intranet di seluruh kantor pemerintahan Kabupaten Temanggung hingga ke kantor desa dikarenakan beberapa desa memilih untuk secara mandiri menyewa jaringan internet dari penyedia layanan internet (ISP). Seperti yang diketahui bersama bahwa jaringan intranet akan bisa diakses melalui jaringan yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun demikian dalam hal desa masih tetap akan mandiri dengan menyewa layanan dari pihak penyedia, Dinas Kominfo akan menyediakan VPN (Virtual Private Network) untuk memfasilitasi desa - desa tersebut jika akan mengakses jaringan intranet. Namun sampai akhir tahun 2020 pengembangan server VPN di Dinas Kominfo belum selesai dan masih dilakukan ujicoba untuk penyempurnaannya. Ke depan diharapkan tidak ada kendala teknis untuk penyediaan jaringan intranet jika server VPN telah berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan;  
Capaian kinerja : 100 % kategori baik
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah.  
Capaian kinerja : 100 % kategori baik

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan IKPD adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu.

Adapun gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinkominfo dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2  
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS	
			2019	2020	2022	2022	2023	2019	2020	2022	2022	2023			
<b>A</b>														<b>INDIKATOR MAKRO DAERAH</b>	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,22	69,54	69,84	70,16	70,49	68,83	69,57	-	-	-	98,69	AT	
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	5,3	5,6	5,8	6,0	5,07	5,05	-	-	-	84,17	AT	
3	Inflasi	%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,89	2,66	-	-	-	66,50	AT	
4	Pendapatan per Kapita	Nilai	27,5	28,7	29,8	30,9	31,9	26,2	28,05	-	-	-	87,93	AT	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,2	3,15	3,10	3,05	2,97	3,24	3,85	-	-	-	70,37	AT	
<b>B</b>														<b>INDIKATOR SASARAN</b>	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,26	3,61	-	-	-	100	TT	
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	78,30	78,80	79,30	79,80	80,30	80,03	95,50	-	-	-	100	TT	
<b>C</b>														<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	
1	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	9,00	12,00	15,00	18,00	20,00	10,70	13,20	-	-	-	65,98	AT	
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	15,63	15,63	-	-	-	52,08	AT	
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT	
4	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	80	90	100	100	100	68,33	73,33	-	-	-	73,33	AT	
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100	100	100	100	80,25	82,03	-	-	-	82,03	AT	
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	13,23	16,17	-	-	-	32,35	UK	
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	40,13	52,27	-	-	-	87,11	AT	
8	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT	
9	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,3	0,43	-	-	-	43,20	AT	

Capaian kinerja daerah sampai dengan tahun 2020 Triwulan IV rata-rata telah tercapai 85,60%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif pada tahun 2020 dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. Dari 341 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan PPID Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 45 PPID yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut dibidang meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya terdapat 38 PPID yang aktif.
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan meskipun dilaksanakan secara daring. Dari 32 KIM tercatat ada 5 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.
3. Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.
4. Penambahan *coverage* jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 324 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 44 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan pengguna pada jaringan internet Pemkab Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif, dan efisien.

5. Performa jaringan terkait dengan *availability* peralatan *repeater* semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan *backup* catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area *repeater* jaringan. Dalam hal ini, Dinkominfo mengadakan peralatan *backup* catu daya dan didistribusikan ke area lokasi *repeater* untuk menjaga *availability* peralatan *repeater* pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
  6. Kebutuhan *bandwidth* untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa, dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinkominfo. Pada tahun 2020, jumlah *bandwidth* yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 750 mbps. Limitasi yang diberikan kepada OPD adalah 100 mbps, Kecamatan 50 mbps, UPT/eks UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, Kelurahan, dan Desa 15 mbps, area publik 3 mbps.
  7. Tata kelola pita lebar (*bandwidth*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi *bandwidth* ke seluruh OPD satu pintu di Dinkominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan *bandwidth* di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
  8. Pengelolaan data center cukup baik dengan adanya *shift* piket di *Network Operation Center* (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (*upgrade*) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah *videowall*, *video processor*, serta *tools* monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (*Secure Socket Layer*) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia
  9. Efektifitas pengelolaan Sumber Daya Manusia bidang TIK cukup baik. Pembuatan, pengembangan, dan modifikasi aplikasi dilakukan oleh *Programmer* di Dinkominfo, baik PNS maupun non PNS. sementara itu kebutuhan tenaga teknis jaringan difungsikan untuk membantu pemasangan baru, pemeliharaan, penambahan, dan penggantian peralatan di
-

seluruh *coverage* jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung

10. *Portal MobileCity* Kabupaten Temanggung berbasis *android* sudah dapat difungsikan. Sebagai pusat informasi dan pelayanan terpadu di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang mudah diakses oleh internal pemerintah Kabupaten Temanggung, maupun masyarakat Kabupaten Temanggung, sebagai sumber informasi dan layanan di Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Dinkominfo antara lain:

1. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Penyebabnya antara lain:
  - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
  - Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, akar permasalahannya antara lain:
  - Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
  - Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.
  - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
  - Terbatasnya SDM di bidang TIK.
3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
  - Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
  - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.

4. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:
  - Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
  - Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
  - Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
  - Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
5. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.

### **2.2.2. Data Pokok**

Data Pokok pada Dinkominfo terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu Data makro Daerah, Data Pokok Bidang Komunikasi dan Informatika, Data Pokok Bidang Statistik, dan Data Pokok Bidang Persandian, dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Data Makro Daerah**

##### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

*United Nations Development Programme* (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*human development report 1990*). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang

---



mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

TAHUN	IPM
2016	67,60
2017	68,34
2018	68,83
2019	69,56
2020	69,57

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami tren kenaikan, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus meningkat, aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih dalam kategori sedang.

b. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai tingkat perubahan harga dari barang dan jasa pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang

sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4  
Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,71	3,61
2018	2,89	2,82	3,13
2019	2,66	2,81	2,72
2020*	2,66	2,81	2,72

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

\*) Data tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019

Angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019 dalam perkembangannya cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi. Dalam satu dasawarsa terakhir, selaras juga dengan yang terjadi di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia, inflasi tertinggi di Kabupaten Temanggung terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,12 persen.

Adapun data yang tersaji untuk tahun 2020 merupakan data sementara, karena inflasi di tahun 2020 belum selesai perhitungannya.

### c. Pertumbuhan Ekonomi

---

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Tabel 2.5  
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung  
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga  
Konstan 2010, Tahun 2016-2020

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2016	17.548.930,01	8,73	13.116.363,64	5,02
2017	18.807.712,01	7,17	13.776.254,81	5,03
2018	20.254.482,86	7,69	14.483.255,21	5,13
2019	21.657.397,07	6,93	15.214.058,87	5,05
2020*	21.557.950	-0,46	14.890.750	-2,13

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya, menggunakan angka PDRB atas dasar konstan dikarenakan PDRB atas harga berlaku masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Penggunaan tahun dasar 2010 sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008), yaitu standar internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip ekonomi.

PDRB tahun 2020 yang angkanya masih sangat sementara dikarenakan perhitungan ditahun 2020 belum selesai dihitung, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dimana untuk PDRB ADHB turun sebesar 0,46% dan untuk PDRB ADHK turun sebesar 2,13%. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya nilai produksi di seluruh lapangan usaha karena pandemi covid 19 yang menyebabkan berkurangnya aktivitas perekonomian.

Sedangkan bila dilihat dari sektor ekonomi yang menjadi komponen PDRB didalamnya, nilai PDRB sebesar itu terdiri dari sektor industri pengolahan sebesar 27,47%, kemudian bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,43%, yang ketiga bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,14%, yang keempat bidang jasa konstruksi sebesar 5,06% dan kelima jasa pendidikan sebesar 5,10%, sedangkan sektor-sektor lainnya besarnya dibawah 5%.

Tabel 2.6  
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2016	5,02	5,27	5,03
2017	5,03	5,27	5,07
2018	5,13	5,32	5,17
2019	5,05	5,41	5,02
2020	- 2,13	- 2,65	- 2,07

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami penurunan sebesar 2,13% dibandingkan tahun 2019 dikarenakan menurunnya aktivitas ekonomi karena masa pandemic covid 19 di 11 sektor ekonomi dari total 17 sektor ekonomi komponen perhitungan PDRB yang digunakan sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi.

d. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah rata-rata besaran pendapatan berupa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolak

ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro. Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7  
Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2020

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	NILAI (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2016	23.321.271,11	7,77
2017	24.775.416,01	6,24
2018	26.455.905,95	6,78
2019	28.052.969,06	6,04
2020*	27.282.535,24	- 2,75

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

\*) Data tahun 2020 merupakan angka sangat sementara

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,75% dibandingkan tahun 2019, secara makro dapat diartikan bahwa masa pandemi covid 19 penduduk Kabupaten Temanggung mengalami penurunan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan jumlah aktivitas ekonomi secara makro yang menurun pada tahun tersebut yang tercermin dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga mengalami penurunan.

e. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran dimana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat

lemahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016-2020

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2016	NA	4,53	5,61
2017	2,97	4,57	5,50
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.8 diatas diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, diantara 100 penduduk temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 4 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di suatu daerah dipengaruhi berbagai hal dan karakteristik setiap daerah berbeda, Kabupaten Temanggung yang tergolong daerah agraris mempunyai karakteristik bahwa lahan pertanian masih tersedia cukup luas akan tetapi kalo dilihat dari pertumbuhan ekonominya sektor yang mengalami pertumbuhan besar didominasi sektor sekunder maupun tersier, dimana hal ini juga berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja di kedua sektor tersebut. Sedangkan lapangan kerja disektor sekunder dan tersier memerlukan penguasaan

akan keahlian dan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal maupun pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan. Kedua hal tersebut akan dapat berjalan seiring jika tingkat pendidikan formal yang ditamatkan penduduk Kabupaten Temanggung meningkat dan terdapat pelatihan ketrampilan yang memadai bagi penduduk Kabupaten Temanggung.

## **2. Bidang Komunikasi dan Informatika**

### **a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) *Domain Kebijakan Internal SPBE;*
- 2) *Domain Tata Kelola SPBE;*
- 3) *Domain Layanan SPBE.*

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9  
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangatbaik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	n.a	2,04	2,82	3,61

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

\*) Data tahun 2020 berdasarkan data hasil evaluasi mandiri

Pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengadakan Evaluasi SPBE yang hanya pada 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak termasuk dalam 130 instansi tersebut, sehingga hanya melakukan Evaluasi Mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Temanggung dengan hasil indeks SPBE sebesar 3,61.

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai



Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/ SAQ (*Self Assesment Quessionaire*)

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan 20 (dua puluh) badan publik dengan

nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi verifikasi.

2) Visitasi Verifikasi

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) Uji Publik

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi di hadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program, dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian *website*;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik.

Tabel 2.11  
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten  
Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70,09	70,8	77,9	80,03	95,5
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Tabel berikut ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi kepada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai terbaik.

Tabel 2.12  
Nilai Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020

KAB/KOTA	Penilaian Tahap 1 / Informasi Wajib Berkala	Penilaian Tahap 2/ Kuesioner Penilaian Mandiri	Penilaian Tahap 3/ Verifikasi dan Penambahan SK Dikecualikan	Penilaian Tahap 4/ Uji Publik Penetapan Peringkat	TOTAL	KATEGORI	PERINGKAT
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
KOTA SEMARANG	100	99,3	95,0	98,7	98,3	INFORMATIF	I
KAB. DEMAK	100	98,0	97,5	94,7	97,5	INFORMATIF	II
KAB. BATANG	100	99,3	92,5	97,8	97,4	INFORMATIF	III
KOTA SURAKARTA	100	100,0	90,0	98,3	97,1	INFORMATIF	IV
KAB. KLATEN	100	100,0	89,8	93,2	95,7	MENUJU INFORMATIF	V
KAB. BREBES	100	96,0	92,5	94,0	95,6	MENUJU INFORMATIF	VI
KAB. TEMANGGUNG	100	94,7	95,0	92,5	95,5	MENUJU INFORMATIF	VII
KAB. BANYUMAS	100	100,0	85,0	94,5	94,9	MENUJU INFORMATIF	VIII
KAB. WONOGIRI	90	100,0	94,8	93,1	94,5	MENUJU INFORMATIF	IX
KAB. KEBUMEN	100	99,3	85,0	93,0	94,3	MENUJU INFORMATIF	X
KAB. REMBANG	100	96,0	85,0	96,3	94,3	MENUJU INFORMATIF	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

c. Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang

akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
    - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - Informasi yang dikecualikan.
  - 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
  - 7) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
-

8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13  
Persentase PPID Pembantu Badan Publik Aktif  
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	5	26	38	45
2	Jumlah PPID badan publik	335	335	335	335	341
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	1,4%	7,3%	11,34 %	13,20%

*Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung*

Berdasarkan Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil. Hal ini dikarenakan masih belum kuatnya kesadaran ditingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan

keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan *website* dan *dashboard* PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 2.14 memperlihatkan keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 2.14  
Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah  
Kabupaten Temanggung

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sekretaris DPRD	-	Aktif	Aktif	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
3	Dinas Pendidikan	-	-	-	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Aktif	Aktif	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	Aktif	Aktif	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	-	Aktif	Aktif	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	Aktif	Aktif	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	Aktif	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	-	-	Aktif	Aktif
11	Dinas Sosial	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	Aktif	Aktif	Aktif
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	Aktif	Aktif	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Informatika				
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Aktif	Aktif	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	Aktif	Aktif	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	Aktif	Aktif	Aktif
20	Inspektorat	-	Aktif	Aktif	Aktif
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	-	Aktif	Aktif	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	-	-	Aktif	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-	-	-	-
28	Kecamatan Tembarak	-	-	Aktif	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	-	-	Aktif	Aktif
30	Kecamatan Kaloran	-	Aktif	Aktif	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	-	-	-	-
32	Kecamatan Parakan	-	-	Aktif	Aktif
33	Kecamatan Kedu	-	-	Aktif	Aktif
34	Kecamatan Bulu	-	Aktif	Aktif	Aktif
35	Kecamatan Kandangan	-	-	Aktif	Aktif
36	Kecamatan Candiroto	-	-	Aktif	Aktif
37	Kecamatan Jumo	-	-	-	-
38	Kecamatan Wonoboyo	-	Aktif	Aktif	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	-	Aktif	Aktif	Aktif
40	Kecamatan Bejen	-	-	Aktif	Aktif
41	Kecamatan Tretep	-	Aktif	Aktif	Aktif
42	Kecamatan Kledung	-	Aktif	Aktif	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	-	-	-	-
44	Kecamatan Tlogomulyo	-	-	Aktif	Aktif
45	Kecamatan Gemawang	-	-	-	-
46	Kecamatan Bansari	-	-	Aktif	Aktif
47	Kelurahan Temanggung I	-	-	-	-
48	Kelurahan Temanggung II	-	-	-	-
49	Kelurahan Butuh	-	-	-	-
50	Kelurahan Jampiroso	-	-	-	-
51	Kelurahan Jampirejo	-	-	-	-
52	Kelurahan Kertosari	-	-	-	-
53	Kelurahan Banyuurip	-	-	-	-
54	Kelurahan Kowangan	-	-	-	-
55	Kelurahan Jurang	-	-	-	-
56	Kelurahan Sidorejo	-	-	-	-
57	Kelurahan Walitelon utara	-	-	-	-
58	Kelurahan Walitelon selatan	-	-	-	-
59	Kelurahan Tlogorejo	-	-	-	-
60	Kelurahan Manding	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
61	Kelurahan Kebonsari	-	-	-	-
62	Kelurahan Mungseng	-	-	-	-
63	Kelurahan Purworejo	-	-	-	-
64	Kelurahan Giyanti	-	-	-	-
65	Kelurahan Madureso	-	-	-	-
66	Kelurahan Kranggan	-	-	-	-
67	Kelurahan Parakan wetan	-	-	-	-
68	Kelurahan Parakan kauman	-	-	-	-
69	Kelurahan Manggong	-	-	-	-
70	Desa Joho	-	-	-	Aktif
71	Desa Guntur	-	-	-	-
72	Desa Lungge	-	-	-	Aktif
73	Desa Mudal	-	-	-	-
74	Desa Gilingsari	-	-	-	-
75	Desa Nampirejo	-	-	-	-
76	Desa Tlogomulyo	-	-	-	-
77	Desa Candisari	-	-	-	-
78	Desa Sriwungu	-	-	-	-
79	Desa Langgeng	-	-	-	-
80	Desa Tanjungsari	-	-	-	-
81	Desa Losari	-	-	-	-
82	Desa Balerejo	-	-	-	-
83	Desa Kerokan	-	-	-	-
84	Desa Legoksari	-	-	-	-
85	Desa Tlilir	-	-	-	-
86	Desa Gedegan	-	-	-	-
87	Desa Pagersari	-	-	-	-
88	Desa Badran	-	-	-	-
89	Desa Bengkal	-	-	-	-
90	Desa Pare	-	-	-	-
91	Desa Nguwet	-	-	-	-
92	Desa Ngropoh	-	-	-	-
93	Desa Pendowo	-	-	-	-
94	Desa Sanggrahan	-	-	-	-
95	Desa Klepu	-	-	-	-
96	Desa Kemloko	-	-	-	-
97	Desa Gentan	-	-	-	-
98	Desa Kramat	-	-	-	-
99	Desa Purwosari	-	-	-	-
100	Desa Tembarak	-	-	-	-
101	Desa Menggoro	-	-	-	-
102	Desa Purwodadi	-	-	-	-
103	Desa Wonokerso	-	-	-	-
104	Desa Kemloko	-	-	-	-
105	Desa Gandu	-	-	-	-
106	Desa Botoputih	-	-	-	-
107	Desa Tawangsari	-	-	-	-
108	Desa Greges	-	-	-	-
109	Desa Krajan	-	-	-	-
110	Desa Jragan	-	-	-	-
111	Desa Drono	-	-	-	-
112	Desa Banaran	-	-	-	-
113	Desa Selopampang	-	-	-	-
114	Desa Tanggulanom	-	-	-	-
115	Desa Jetis	-	-	-	-



No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
116	Desa Salamrejo	-	-	-	-
117	Desa Ngaditirto	-	-	-	-
118	Desa Bulan	-	-	-	-
119	Desa Kacepit	-	-	-	-
120	Desa Gambasan	-	-	-	-
121	Desa Bumiayu	-	-	-	-
122	Desa Kebonagung	-	-	-	-
123	Desa Bagus	-	-	-	-
124	Desa Plumbon	-	-	-	-
125	Desa Pringsurat	-	-	-	-
126	Desa Kebumen	-	-	-	-
127	Desa Soropadan	-	-	-	-
128	Desa Kupon	-	-	-	Aktif
129	Desa Karangwuni	-	-	-	-
130	Desa Gowak	-	-	-	-
131	Desa Rejosari	-	-	-	-
132	Desa Pingit	-	-	-	-
133	Desa Klepu	-	-	-	-
134	Desa Soborejo	-	-	-	-
135	Desa Nglorok	-	-	-	-
136	Desa Pagergunung	-	-	-	-
137	Desa Wonokerso	-	-	-	-
138	Desa Ngipik	-	-	-	-
139	Desa Kaloran	-	-	-	-
140	Desa Tlogowungu	-	-	-	Aktif
141	Desa Gandon	-	-	-	-
142	Desa Tleter	-	-	-	-
143	Desa Getas	-	-	-	-
144	Desa Kalimanggis	-	-	-	-
145	Desa Tempuran	-	-	-	-
146	Desa Kemiri	-	-	-	-
147	Desa Geblog	-	-	-	-
148	Desa Tegowanuh	-	-	-	-
149	Desa Keblukan	-	-	-	-
150	Desa Tepusen	-	-	-	-
151	Desa Gandulan	-	-	-	-
152	Desa Kwarakan	-	-	-	-
153	Desa Campursalam	-	-	-	-
154	Desa Wanutengah	-	-	-	-
155	Desa Nglondong	-	-	-	-
156	Desa Bagus	-	-	-	-
157	Desa Dangkel	-	-	-	-
158	Desa Mandisari	-	-	-	-
159	Desa Tegalroso	-	-	-	-
160	Desa Traji	-	-	-	-
161	Desa Watukumpul	-	-	-	-
162	Desa Ringinanom	-	-	-	-
163	Desa Depakharjo	-	-	-	-
164	Desa Caturanom	-	-	-	-
165	Desa Gelapansari	-	-	-	-
166	Desa Sunggingsari	-	-	-	-
167	Desa Bansari	-	-	-	-
168	Desa Mojosari	-	-	-	-
169	Desa Rejosari	-	-	-	-
170	Desa Gunungsari	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
171	Desa Balesari	-	-	-	-
172	Desa Purborejo	-	-	-	-
173	Desa Tlogowero	-	-	-	-
174	Desa Mranggen Kidul	-	-	-	-
175	Desa Mranggen Tengah	-	-	-	-
176	Desa Candisari	-	-	-	-
177	Desa Campuranom	-	-	-	-
178	Desa Gentingsari	-	-	-	-
179	Desa Tanurejo	-	-	-	-
180	Desa Kledung	-	-	-	-
181	Desa Kalirejo	-	-	-	-
182	Desa Paponan	-	-	-	-
183	Desa Jeketro	-	-	-	-
184	Desa Kwadungan Gunung	-	-	-	-
185	Desa Kwadungan Jurang	-	-	-	-
186	Desa Tlahap	-	-	-	-
187	Desa Petarangan	-	-	-	-
188	Desa Canggal	-	-	-	-
189	Desa Jambu	-	-	-	-
190	Desa Kruwisan	-	-	-	-
191	Desa Tuksari	-	-	-	-
192	Desa Kedu	-	-	-	-
193	Desa Candimulyo	-	-	-	-
194	Desa Salamsari	-	-	-	-
195	Desa Danurejo	-	-	-	-
196	Desa Mojotengah	-	-	-	-
197	Desa Karangtejo	-	-	-	-
198	Desa Mergowati	-	-	-	-
199	Desa Kutoanyar	-	-	-	-
200	Desa Kundisari	-	-	-	-
201	Desa Ngadimulyo	-	-	-	-
202	Desa Gondangwayang	-	-	-	-
203	Desa Bandunggede	-	-	-	-
204	Desa Tegalsari	-	-	-	-
205	Desa Bojonegoro	-	-	-	-
206	Desa Bulu	-	-	-	-
207	Desa Tegalurung	-	-	-	-
208	Desa Campursari	-	-	-	-
209	Desa Gandurejo	-	-	-	-
210	Desa Gondosuli	-	-	-	-
211	Desa Ngimbrang	-	-	-	-
212	Desa Putat	-	-	-	-
213	Desa Danupayan	-	-	-	-
214	Desa Mondoretno	-	-	-	-
215	Desa Pandemulyo	-	-	-	Aktif
216	Desa Pasuruhan	-	-	-	-
217	Desa Pakurejo	-	-	-	-
218	Desa Tegalrejo	-	-	-	-
219	Desa Malangsari	-	-	-	-
220	Desa Pagergunung	-	-	-	-
221	Desa Wonosari	-	-	-	-
222	Desa Bansari	-	-	-	-
223	Desa Wonotirto	-	-	-	-
224	Desa Pengilon	-	-	-	-
225	Desa Kandangan	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
226	Desa Baledu	-	-	-	-
227	Desa Caruban	-	-	-	-
228	Desa Wadas	-	-	-	-
229	Desa Samiran	-	-	-	-
230	Desa Ngemplak	-	-	-	Aktif
231	Desa Kembang Sari	-	-	-	-
232	Desa Gesing	-	-	-	-
233	Desa Margolelo	-	-	-	-
234	Desa Blimbing	-	-	-	-
235	Desa Kedungumpul	-	-	-	-
236	Desa Rowo	-	-	-	-
237	Desa Malebo	-	-	-	-
238	Desa Tlogopucang	-	-	-	-
239	Desa Kedawung	-	-	-	-
240	Desa Banjarsari	-	-	-	-
241	Desa Candiroto	-	-	-	-
242	Desa Lampuyang	-	-	-	-
243	Desa Canggal	-	-	-	-
244	Desa Kenteng Sari	-	-	-	-
245	Desa Ngabeyan	-	-	-	-
246	Desa Bantir	-	-	-	-
247	Desa Krawitan	-	-	-	-
248	Desa Muntung	-	-	-	-
249	Desa Batusari	-	-	-	-
250	Desa Mento	-	-	-	-
251	Desa Muneng	-	-	-	-
252	Desa Plosogaden	-	-	-	-
253	Desa Sidoharjo	-	-	-	-
254	Desa Gunungpayung	-	-	-	-
255	Desa Bejen	-	-	-	-
256	Desa Banjarsari	-	-	-	-
257	Desa Jlegong	-	-	-	-
258	Desa Prangkakan	-	-	-	-
259	Desa Lowungu	-	-	-	-
260	Desa Larangan Luwok	-	-	-	-
261	Desa Congkrang	-	-	-	-
262	Desa Kebondalem	-	-	-	-
263	Desa Kemuning	-	-	-	-
264	Desa Selosabrang	-	-	-	-
265	Desa Tanjungsari	-	-	-	-
266	Desa Petung	-	-	-	-
267	Desa Duren	-	-	-	-
268	Desa Ngaliyan	-	-	-	-
269	Desa Jumo	-	-	-	-
270	Desa Jamusan	-	-	-	-
271	Desa Kertosari	-	-	-	-
272	Desa Giyono	-	-	-	-
273	Desa Gununggempol	-	-	-	-
274	Desa Padureso	-	-	-	-
275	Desa Barang	-	-	-	-
276	Desa Jombor	-	-	-	-
277	Desa Ketitang	-	-	-	-
278	Desa Morobongo	-	-	-	-
279	Desa Karangtejo	-	-	-	-
280	Desa Sukomarto	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
281	Desa Gedongsari	-	-	-	-
282	Desa Gemawang	-	-	-	-
283	Desa Muncar	-	-	-	-
284	Desa Kemiriombo	-	-	-	-
285	Desa Ngadisepi	-	-	-	-
286	Desa Krempong	-	-	-	-
287	Desa Sucen	-	-	-	-
288	Desa Karangseneng	-	-	-	-
289	Desa Banaran	-	-	-	-
290	Desa Kalibanger	-	-	-	-
291	Desa Jambon	-	-	-	-
292	Desa Tretep	-	-	-	-
293	Desa Donorojo	-	-	-	-
294	Desa Nglarangan	-	-	-	-
295	Desa Sigidong	-	-	-	-
296	Desa Bonjor	-	-	-	-
297	Desa Tempelsari	-	-	-	-
298	Desa Campurejo	-	-	-	-
299	Desa Bojong	-	-	-	-
300	Desa Bandungan	-	-	-	-
301	Desa Simpar	-	-	-	-
302	Desa Tlogo	-	-	-	-
303	Desa Wonoboyo	-	-	-	-
304	Desa Pateken	-	-	-	-
305	Desa Pitrosari	-	-	-	-
306	Desa Purwosari	-	-	-	-
307	Desa Kebonsari	-	-	-	-
308	Desa Semen	-	-	-	-
309	Desa Tening	-	-	-	-
310	Desa Wonocoyo	-	-	-	-
311	Desa Pesantren	-	-	-	-
312	Desa Rejosari	-	-	-	-
313	Desa Tawangsari	-	-	-	-
314	Desa Wates	-	-	-	-
315	Desa Cemoro	-	-	-	-
316	Desa Ngadirejo	-	-	-	-
317	Desa Gondang Winangun	-	-	-	-
318	Desa Ganduwetan	-	-	-	-
319	Desa Ngaren	-	-	-	-
320	Desa Mangunsari	-	-	-	-
321	Desa Dlimoyo	-	-	-	-
322	Desa Purbosari	-	-	-	-
323	Desa Campursari	-	-	-	-
324	Desa Tegalrejo	-	-	-	-
325	Desa Giripurno	-	-	-	-
326	Desa Katekan	-	-	-	-
327	Desa Banjarsari	-	-	-	-
328	Desa Medari	-	-	-	-
329	Desa Karanggedong	-	-	-	-
330	Desa Munggangsari	-	-	-	-
331	Desa Kataan	-	-	-	-
332	Desa Petirejo	-	-	-	-
333	Desa Pringapus	-	-	-	-
334	Desa Gejagan	-	-	-	-
335	Desa Batusari	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
336	PDAM Tirta Agung	-	-	-	-
337	PD BPR Bank Pasar	-	-	-	-
338	PD Apotik Waringin Mulyo	-	-	-	-
339	PD BPR BKK Temanggung	-	-	-	-
340	PD Aneka Usaha	-	-	-	-
341	PD Bhumi Phala Wisata	-	-	-	-
<b>Jumlah PPID Aktif</b>		<b>5</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>45</b>

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

d. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan peran serta diseminasi kepada masyarakat KIM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;

- Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya dalam rangka mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15  
Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	1	2	5	5
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	n.a	19	32	32	32
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	3,2%	6,25 %	15,63 %	15,63 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

\*Data tahun 2020 masih sama dengan data tahun 2019

Pada Tahun 2020, tidak ada jumlah penambahan KIM yang terbentuk maupun KIM yang aktif. Hal ini dikarenakan anggaran yang diperuntukkan untuk pembentukan dan pendampingan KIM terkena refocusing. Dinas Kominfo sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) untuk mendorong agar desa dapat menganggarkan

pemberdayaan KIM ini di APBDesa maupun alokasi Dana Desa.

KIM yang sudah dibentuk diwadahi dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, merupakan KIM yang bersifat kewilayahan, yaitu tingkat desa. Selain membentuk dan memperkuat KIM yang bersifat kewilayahan, kedepan Dinkominfo juga berencana untuk membentuk dan melaksanakan pendampingan terhadap komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di masyarakat. KIM yang dibentuk belum seluruhnya aktif seperti yang diharapkan dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- SDM pelaku KIM yang beragam, khususnya dalam penguasaan Teknologi Informasi Komunikasi dan literasi media, hal ini memerlukan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan teknis yang terukur dan komprehensif;
- Pendampingan yang dilakukan oleh Dinkominfo dirasa masih belum optimal, karena keterbatasan anggaran dan SDM, sehingga diperlukan sinergi dan peran aktif dari para pelaku KIM

Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan keaktifan KIM adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, sarasehan, diskusi, workshop dan bimtek, dengan materi yang bersifat teknis maupun peningkatan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap literasi informasi. Adapun KIM yang sudah dibentuk disajikan pada Tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16  
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab.  
Temanggung

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017		✓

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBEN -TUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari, Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat, Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017	✓	
8	Ngudi Sari	Desa Malangsari Kec. Bulu	2017		✓
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017		✓
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017		✓
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017		✓
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017		✓
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017		✓
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017		✓
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017	✓	
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018		✓
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	✓	
25	Podo Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018		✓
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		✓
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018		✓



NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBEN-TUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018		✓
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018		✓
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018		✓
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018		✓
Jumlah				5	27

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

e. Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Regulasi penyiaran yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Program Penyiaran (P3) dan SPS (Standar Program Siaran), serta aturan terkait penyiaran yang ditetapkan

oleh lembaga penyiaran, baik Kominfo, Balai Monitoring (Balmon) dan Komisi Penyiaran. Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti. Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

---

Tabel 2.17  
 Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma siaran  
 Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	8	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dari Tabel 2.17 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18  
 LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	Jl. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinkominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinkominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

f. Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinkominfo.

Sampai dengan awal tahun 2020 ini tercatat ada 60 area publik yang menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet. Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2016 s.d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19  
Area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	6	7	25	41	44

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah area publik	25	25	60	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	24	28	41,6	68,3	73,33

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Saat ini jumlah area publik yang telah difasilitas akses internet gratis 44 titik. Penambahan sebesar 3 titik dari tahun sebelumnya ditempatkan pada pasar Parakan lantai 1 dan puskesmas Banjarsari Ngadirejo. Terjadinya pandemi *covid-19* selama tahun 2020 beberapa wifi di area publik dimatikan untuk menghindari adanya masyarakat yang berkerumun di sekitaran area *hotspot* yaitu sejak bulan Maret hingga bulan Agustus.

Tabel 2.20  
Lokasi area publik Kabupaten Temanggung

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
1	Halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	2016	2016	Aktif
2	Areal pusat Komunitas kreatif	2016	2016	Aktif
3	Alun-Alun	2016	2016	Aktif
4	Taman Pengayoman	2016	2016	Aktif
5	Area Pendopo Jenar	2016	2016	Aktif
6	Area Setda	2016	2016	Aktif
7	Pikatan Waterpark	2017	2017	Aktif
8	Taman Kali Progo	2018	2018	Aktif
9	Pujasera	2018	2018	Aktif
10	Taman kartini	2016	2016	Aktif
11	Tirto Asri Water splash	2018	2018	Aktif
12	Hutan Kota Gumuk Lintang	2018	2018	Aktif
13	City Walk (tugu jam)	2018	2018	Aktif
14	Pasar Kliwon	2018	2018	Aktif
15	Plaza (Pasar Temanggung Permai)	2018	2018	Aktif
16	Area Kuliner Samping DPRD	2018	2018	Aktif
17	Majid Agung Darussalam	2018	2018	Aktif
18	Citywalk Depan Diskominfo	2018	2018	Aktif
19	Citywalk Depan Kecamatan Temanggung	2018	2018	Aktif
20	Area RSUD Djoyonegoro	2018	2018	Aktif
21	Area Lapangan TV Temanggung	2018	2018	Aktif

<b>No</b>	<b>Lokasi Area Publik</b>	<b>Tahun Pene-tapan</b>	<b>Tahun Pema-sangan</b>	<b>Status Jaringan</b>
22	Area Pasar Burung Kerkop	2018	2018	Aktif
23	Terminal Temanggung	2018	2018	Aktif
24	GOR Bambu Runcing	2018	2018	Aktif
25	Komplek Stadion	2018	2018	Aktif
26	Citywalk depan kantor NU	2019	2019	Aktif
27	Citywalk depan warung jadul	2019	2019	Aktif
28	RSUD timur bagian dalam	2019		
29	RSUD barat ruang tunggu	2019		
30	Ruang pelayanan Dindukcapil	2019	2019	Aktif
31	Taman Bambu Runcing	2019	2019	Aktif
32	Pasar Parakan1 - selatan lantai 1	2019	2020	Aktif
33	Pasar Parakan2 - utara lantai 1	2019	2020	Aktif
34	Pasar Parakan3 - selatan lantai 1	2019		
35	Pasar Parakan4 - selatan lantai 2	2019		
36	Ruang tunggu Puskesmas Temanggung	2019	2019	Aktif
37	Ruang tunggu Puskesmas Tlogomulyo	2019		
38	Ruang tunggu Puskesmas Tembarak	2019		
39	Ruang tunggu Puskesmas Selopampang	2019		
40	Ruang tunggu Puskesmas Pringsurat	2019		
41	Ruang tunggu Puskesmas Rejosari	2019	2019	Aktif
42	Ruang tunggu Puskesmas Kranggan	2019		
43	Ruang tunggu Puskesmas Banjarsari	2019	2019	Aktif
44	Ruang tunggu Puskesmas Parakan	2019	2019	Aktif
45	Ruang tunggu Puskesmas Traji	2019		
46	Ruang tunggu Puskesmas Bulu	2019	2019	Aktif
47	Ruang tunggu Puskesmas Ngadirejo	2019		
48	Ruang tunggu Puskesmas Kaloran	2019		
49	Ruang tunggu Puskesmas Tepusen	2019		
50	Ruang tunggu Puskesmas Candiroto	2019		
51	Ruang tunggu Puskesmas Bejen	2019		
52	Ruang tunggu Puskesmas Bansari	2019	2019	Aktif
53	Ruang tunggu Puskesmas Wonobojo	2019		
54	Ruang tunggu	2019	2019	Aktif

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
	Puskesmas Tretep			
55	Ruang tunggu Puskesmas Kedu	2019	2019	Aktif
56	Ruang tunggu Puskesmas Kledung	2019	2019	Aktif
57	Ruang tunggu Puskesmas Kandangan	2019	2019	Aktif
58	Ruang tunggu Puskesmas Jumo	2019		
59	Ruang tunggu Puskesmas Gemawang	2019	2019	Aktif
60	Ruang tunggu Puskesmas Dharmarini	2019	2019	Aktif
Jumlah		60	60	44

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Layanan internet publik meskipun selama 6 (enam) bulan dimatikan namun tetap banyak diminati selama masa pandemi dengan limitasi per titik adalah 2 Mbps untuk mengurangi tingkat kerumunan. Hingga akhir tahun 2020, penggunaan bandwidth untuk seluruh area mencapai titik maksimal 33.30 Mbps sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.8 tentang grafik okupansi bandwidth internet publik.

g. Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti remote login, transfer file, surat elektronik, World Wide Web dan newsgroup. Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Jaringan internet dilewatkan melalui media kabel (*wired*) dan nirkabel (*wireless*) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Angka presentasi ketersediaan jaringan internet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%.

Tabel 2.21  
 Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab.  
 Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung	88	146	235	317	324
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	395	395	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet	22,28%	36,96%	59,49%	80,25%	82,03%

*Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung*

Dari Tabel 2.21 dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2016 s.d 2020 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Pada Tabel 2.22 berikut ini diperlihatkan jumlah ketersediaan jaringan internet secara rinci.

Tabel 2.22  
 Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten  
 Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	24	25	27	27	27
2	Jumlah Kecamatan	16	16	20	20	20
3	Jumlah Kelurahan	2	7	14	23	23
4	Jumlah Desa	31	73	126	193	193
5	Jumlah UPT/eks UPT	15	25	39	54	54
JUMLAH		88	146	235	317	317

*Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung*

h. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,



bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Tabel 2.23  
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	5	19	31	61	61
2	Jumlah sistem informasi	377	398	456	461	463
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	1,3 %	4,7%	6,79%	13,23 %	13,17 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Data sistem informasi yang terintegrasi pada sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24  
Sistem Informasi yang Terintegrasi

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTE-GRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	2017	1	e-movev
2	sibangda	2017	1	mapatda
3	Lpse	2016	1	sirup
4	Jdih	2018	1	e-dokum (dokumen hukum)
5	p2kp	2017	1	simpeg
6	Portal VPN dan SSO	2018	1	sistem informasi lain
7	dindikpora	2018	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	2017	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dindukcapil	2017	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmpstsp	2018	1	data kependudukan
11	monitorabsen	2017	1	Simpeg, e-tp, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	2016	1	bank data, sipd, data
13	e-kinerja	2017	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	simpeg	2017	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	2018	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	2017	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	2018	1	simpeg, e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	2018	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	2017	1	simpeg
21	e-peluk ASN	2017	1	simpeg
22	mapatda	2017	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	2017	1	mapatda
24	Data	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTEGRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
25	layanan kependudukan online	2017	1	data kependudukan
26	e-planning	2018	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	2018	1	e-planning, e-monev
28	sirup	2016	1	lpse
29	e-monev	2018	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	1	jdih
31	GIS Terintegrasi	2018	1	gis tataruang
32	SMS	2019	1	Lapor SP4N
33	Simpus (24 aplikasi)	2019	24	Data kependudukan
34	e-risalah	2019	1	Jdih
35	sanka	2019	1	Gandem
36	e-statistik	2019	1	PPID
Jumlah			61	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

i. Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Realisasi persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25  
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	20	29	175	185	192
2	Jumlah sistem informasi	377	398	456	461	463
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	5,3 %	7,2 %	38,38 %	40,13 %	41,47 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.25 di dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Adapun data sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26  
Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Tahun 2020

NO	NAMA SIM	JML	BERFUNGSI OPTIMAL				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	temanggungkab.go.id	1	1	1	1	1	1
2	Simbada	1	1	1	1	1	1
3	sibangda	1	1	1	1	1	1
4	lpse	1	1	1	1	1	1
5	jdih	1			1	1	1
6	p2kp	1	1	1	1	1	1
7	mail	1			1	1	1
8	sms	1	1	1	1	1	1
9	dindikpora	1			1	1	1
10	sipd	1	1	1	1	1	1
11	puskomkref	1			1	1	1
12	simwasda.inspektorat	1			1	1	1
13	ppid	1			1	1	1
14	dindukcapil	1			1	1	1
15	cellplan	1			1	1	1
16	perizinan-dpmpstsp	1			1	1	1
17	rsud	1			1		
18	monitorabsen	1		1	1	1	1

NO	NAMA SIM	JML	BERFUNGSI OPTIMAL				
			2016	2017	2018	2019	2020
19	sipt	1			1	1	1
20	gandem	1			1	1	1
21	simdkt	1			1	1	1
22	e-kinerja	1		1	1	1	1
23	simpeg	1	1	1	1	1	1
24	Bankdata	1			1	1	1
25	Gis Tata Ruang	1		1	1	1	1
26	e-TPP	1		1	1	1	1
27	Portal Sistem Informasi	1			1	1	1
28	bkpsdm	1			1	1	1
29	sivespa	1			1	1	1
30	e-retribusi	1			1	1	1
31	simelon	1			1	1	1
32	inbox.bkd	1			1	1	1
33	e-peluk ASN	1			1	1	1
34	mapatda	1	1	1	1	1	1
35	sig-mapatda-bppkad	1			1	1	1
36	data	1			1	1	1
37	layanan kependudukan online	1			1	1	1
38	e-planning	1			1	1	1
39	e-budgeting	1			1	1	1
40	sirup	1	1	1	1	1	1
41	e-risalah	1			1	1	1
42	e-monev	1			1	1	1
43	sigender	1			1	1	1
44	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1			1	1	1
45	rupabumi	1			1	1	1
46	GIS Terintegrasi	1			1	1	1
47	Portal VPN dan SSO	1			1	1	1
48	mediacenter	1			1	1	1
49	musrenbang	1			1		
50	website kecamatan	20			18	20	20
51	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	289	10	14	20	20	25
52	Website OPD	22			18	22	22
53	paten-kecamatan	20			20	20	20
54	simpus	24			24	24	24
55	web puskesmas	26			26	26	26
56	simpeda	1		1			
57	surya	1					
58	kantaya	1					
59	simonit	1					
60	tito.bappeda	1					
61	dekranasda	1					
62	e-Statistik	1				1	1
63	e-Usaha	1				1	1
64	Santunan Kematian	1				1	1
65	Apdul (Schedule)	1				1	1
66	Dana Desa	1				1	1
67	rekap pilkades	1					1
68	Web corona	1					1
Jumlah		463	20	29	175	185	192

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

### 3. Bidang Statistik

#### a. Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks *Williamson*, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen. Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 7 (tujuh) yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Cakupan ketersediaan data makro daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27

Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Data makro	5	6	6	5	0

	yang tersedia					
2	Kebutuhan data makro	7	7	7	5	5
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	71,4%	85,7%	87%	100%	0%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.27 dapat dilihat bahwa cakupan ketersediaan data makro daerah belum dapat tercapai 100%, hal ini karena penyusunan IPM dan INKESRA secara bergantian tiap dua tahun sekali. Data dukung terkait indikator cakupan ketersediaan data makro daerah ditampilkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28  
Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
3	Laju Inflasi	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tidak terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
	TOTAL	4	5	5	5	0

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

#### 4. Bidang Persandian

##### a. Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis *web*, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu *bugs* (aplikasi tidak bisa memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah disepakati dan *security vulnerability*. Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis *web* memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan *IT Security Assessment*, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Realisasi tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

---



Tabel 2.29  
Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko  
Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun  
2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	n.a	5	7	0
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	n.a	60	461	463
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	n.a	8,3%	1,52	0

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.29 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun 2018 masih sangat kecil, karena kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan *Security Assessment*. Pada tahun 2018 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2019 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi (ketentuan BSSN). Target yang ditetapkan tahun 2019-2023 sebesar 1% per tahun.

Data dukung terkait tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel-tabel berikut:

Tabel 2.30  
Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
1	bag humas	Website Pemkab	1	temanggungkab.go.id.temanggungkab.go.id
2	bppkad	Simbada	1	Simbada.temanggungkab.go.id
3	bag pembangunan	sibangda	1	sibangda.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
4	bag pemba- ngunan	LPSE	1	lpse.temanggungkab.go.id
5	bag Hukum	JDIH	1	jdih.temanggungkab.go.id
6	BKPSDM	P2KP	1	p2kp.temanggungkab.go.i d
7	Dinkominfo	Mail	1	mail.temanggungkab.go.id
8	Dinkes	Simpus	1	simpus.temanggungkab.g o.id
9	bag humas	Sms	1	sms.temanggungkab.go.id
10	dindikpora	Dindikpora	1	dindikpora.temanggungka b.go.id
11	off	simonit	1	simonit.temanggungkab.g o.id
12	bappeda	sipd	1	sipd.temanggungkab.go.id
13	bappeda	tito.bapped a	1	tito.bappeda.temanggungk ab.go.id
14	off	dekranasda	1	dekranasda.temanggungk ab.go.id
15	Dinkominfo	puskomkref	1	puskomkref.temanggungk ab.go.id
16	inspektorat	simwasda.i nspektorat	1	simwasda.inspektorat.tem anggungkab.go.id
17	Dinkominfo	ppid	1	ppid.temanggungkab.go.id
18	Dindukcapil	dindukcapil	1	dindukcapil.temanggungk ab.go.id
19	DPMPTSP	cellplan	1	cellplan.temanggungkab.g o.id
20	DPMPTSP	perizinan- dpmptsp	1	perizinan- dpmptsp.temanggungkab. go.id
21	BKPSDM	monitorabs en	1	monitorabsen.temanggun gkab.go.id
22	Dinkes	sipt	1	sipt.temanggungkab.go.id
23	Dinkominfo	website kecamatan	1	website kecamatan.temanggungka b.go.id
24	dinsos	web dinsos	1	web dinsos.temanggungkab.go .id
25	Dinkominfo	gandem	1	gandem.temanggungkab.g o.id
26	bappeda	simdkt	1	simdkt.temanggungkab.go .id
27	dinpermade s	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	1	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan).temanggungk ab.go.id
28	bag ortala	e-kinerja	1	e-

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
				kinerja.temanggungkab.go.id
29	BKPSDM	simpeg	1	simpeg.temanggungkab.go.id
30	Dinkominfo	Bankdata	1	Bankdata.temanggungkab.go.id
31	DPUPKP	Gis Tata Ruang	1	Gis Tata Ruang.temanggungkab.go.id
32	bag ortala	e-TPP	1	e-TPP.temanggungkab.go.id
33	Dinkominfo	Website OPD	1	Website OPD.temanggungkab.go.id
34	Dinkominfo	Portal Sistem Informasi	1	Portal Sistem Informasisifo.temanggungkab.go.id
35	BKPSDM	bkpsdm	1	bkpsdm.temanggungkab.go.id
36	satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar	1	sivespa-satpolppdamkar.temanggungkab.go.id
37	Dinperindagkopukm	e-retribusi	1	e-retribusi.temanggungkab.go.id
38	Bag perekonomian	simelon3kg-setda	1	simelon3kg-setda.temanggungkab.go.id
39	BKPSDM	inbox.bkd	1	inbox.bkd.temanggungkab.go.id
40	BKPSDM	e-peluk ASN	1	e-peluk ASN.temanggungkab.go.id
41	bppkad	mapatda	1	mapatda.temanggungkab.go.id
42	bppkad	sig-mapatda-bppkad	1	sig-mapatda-bppkad-bppkad-online.temanggungkab.go.id
43	Dinkominfo	data	1	data.temanggungkab.go.id
44	Dindukcapil	layanan kependudukan online	1	layanan kependudukan onlinedindukcapil.temanggungkab.go.id/pelayanan
45	bappeda	e-planning	1	e-planning.temanggungkab.go.id
46	bppkad	e-budgeting	1	e-budgeting.temanggungkab.go.id
47	bag. Pemba-	sirup	1	sirup.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
	ngunan (pusat)			
48	BPPKAD	SIAKD (akrual)	1	dekstop base
49	dinpermade s	siskeudes	1	dekstop base
50	SETWAN	e-risalah	1	e- risalah.temanggungkab.go .id
51	bappeda	e-monev	1	e- monev.temanggungkab.go .id
52	DPPKBPP A	sigender	1	sigender.temanggungkab. go.id
53	Bag. Hukum	e-dokum	1	e- dokum.temanggungkab.go .id
54	Bag. Pemerintah an	rupabumi	1	rupabumi.temanggungkab .go.id
55	Dinkes	web puskesmas	1	web puskesmas.temanggungka b.go.id
56	Dinkominfo	GIS Terintegrasi	1	GIS Terintegrasi.temanggungk ab.go.id
57	Dinkominfo	Portal VPN dan SSO	1	Portal VPN dan SSO.temanggungkab.go.id
58	Dinkominfo	mediacenter	1	mediacenter.temanggungk ab.go.id
59	bappeda	musrenban g	1	musrenbang.temanggung kab.go.id
60	DPMPTSP	paten- kecamatan	1	paten- kecamatan.temanggungka b.go.id
61	Dinkominfo	website kecamatan	20	
62	Dinkominfo	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	289	
63	Dinkominfo	Website OPD	22	
64	Dinkominfo	paten- kecamatan	20	
65	Dinkominfo	simpus	24	
66	Dinkominfo	web puskesmas	26	
67	Dinkominfo	Rekap pilkades	1	

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
68	Dinkominfo	Web corona	1	
JUMLAH			463	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Tabel 2.31  
Hasil TT *Security Assesment* oleh BSSN di Kabupaten  
Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT	TING- KAT RESIKO	TAHUN ASSES MENT
1	Dinkominfo	Gandem	<a href="https://gandem.temanggungkab.go.id">https://gandem.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi	2018
2	BPPKAD	Mapatda	<a href="http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/">http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/</a>	Sedang	2018
3	BKPSDM	Simpeg	<a href="http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id">http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi	2018
4	Dinas Kesehatan	Simpus	<a href="http://ujisimpus.temanggungkab.go.id">http://ujisimpus.temanggungkab.go.id</a>	Sedang	2018
5	Bappeda	Simdkt	<a href="http://simdkt.temanggungkab.go.id">http://simdkt.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi	2018
6	Bappeda	e-planning	<a href="http://e-planning.temanggungkab.go.id">e-planning.temanggungkab.go.id</a>	Sedang	2019
7	BKPSDM	e-tpp	<a href="http://e-tpp.temanggungkab.go.id">e-tpp.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi	2019
8	BPPKAD	Mapatda	<a href="http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/">http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/</a>	Sedang	2019
9	Dinhub	Ujikir		Tinggi	2019
10	BKPSDM	e-kinerja	<a href="http://Kinerja.temanggungkab.go.id">Kinerja.temanggungkab.go.id</a>	Tinggi	2019

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinkominfo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinkominfo dari 9 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
    - a. Persentase ketersediaan akses internet publik  
Hal ini disebabkan karena keterbatasan bandwidth yang akan didistribusikan di ruang publik, keterbatasan anggaran serta sapsras pendukung di area publik (kelistrikan dan keamanan alat)
    - b. Persentase ketersediaan jaringan intranet  
Hal ini disebabkan karena Sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha
    - c. Persentase sistem informasi yang terintegrasi  
Hal ini disebabkan karena banyaknya sistem informasi/aplikasi yang sudah lebih dulu dibangun oleh masing-masing Perangkat Daerah, dengan teknologi dan pengembang yang berbeda sehingga menyulitkan untuk mengintegrasikan antar sistem informasi. Selain itu juga ada beberapa aplikasi yang memang tidak ada keterkaitan data dengan aplikasi yang lain, sehingga memang belum perlu untuk diintegrasikan.
    - d. Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi  
Hal ini disebabkan karena tidak bisa melakukan assesment karena keterbatasan sumber daya dan anggaran kegiatan.
  2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, antara lain:
    - a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Masalah ini disebabkan karena banyaknya
-

sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik, yang menjadi akar permasalahannya antara lain:

- Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
  - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
  - Terbatasnya SDM di bidang TIK.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
  - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
  - Masih minimnya SDM di bidang TIK.
- c. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat desa di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
- Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
  - Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
- d. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, hal ini disebabkan karena beberapa masalah antara lain:
- Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah
  - Terbatasnya SDM di bidang TIK

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

---



Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

### 3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga

dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

#### 4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32  
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					3.595.169.000	A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					3.595.169.000	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					5.000.000	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					5.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Evaluasi Renstra, Pra-RKA, RKA, DPA, dan DPPA	Kab. Temanggung	7	dok	2.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Evaluasi Renstra, Pra-RKA, RKA, DPA, dan DPPA	Kab. Temanggung	7	dok	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya dokumen evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, RFK, IKPD, dan Data Pokok	Kab. Temanggung	26	dok	3.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya dokumen evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, RFK, IKPD, dan Data Pokok	Kab. Temanggung	26	dok	3.000.000	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					3.219.307.000	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					3.219.307.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.219.307.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.219.307.000	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					157.362.000	3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					157.362.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Bangunan Kantor	bangunan kantor				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	20.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	14.862.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	35.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>40.000.000</b>
	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarpras mebeleur kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Bangunan Kantor	bangunan kantor					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	14.862.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	35.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000	
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>40.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarpras mebeleur kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>103.500.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	7.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	12.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan terealisasinya pengadaan peralatan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	79.000.000
		Terbayarnya honorarium SS Tenaga Administrasi, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	
		Terlaksananya servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan	
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>70.000.000</b>

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>103.500.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	7.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan terealisasinya pengadaan peralatan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	79.000.000	
		Terbayarnya honorarium SS Tenaga Administrasi, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	-	
		Terlaksananya servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan	-	
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>70.000.000</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000
<b>6</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai	Kab. Temanggung		setel	-
<b>B</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					<b>3.360.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>3.360.000.000</b>
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	Kab. Temanggung	12	bulan	100.000.000
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan perangkat multimedia produksi dan pengelolaan konten informasi, (Media Luar Ruang)	Kab. Temanggung	1	paket	250.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000	
<b>6</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai	Kab. Temanggung		setel	-	
						-	
<b>B</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					<b>4.933.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>4.933.000.000</b>	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	Kab. Temanggung	12	bulan	125.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan perangkat multimedia produksi dan pengelolaan konten informasi, (Media Luar Ruang)	Kab. Temanggung	1	paket	350.000.000	Usulan penambahan anggaran

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Terlaksananya layanan komunikasi dan operasional melalui Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12	bulan				Terlaksananya layanan komunikasi dan operasional melalui Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12	bulan		-
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	2.333.000.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	3.433.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	152.000.000		Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	155.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	Kab. Temanggung	3	keg.	50.000.000		Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	Kab. Temanggung	3	keg.	350.000.000	Usulan penambahan anggaran

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Kab. Temanggung	12	bulan	125.000.000
		Terselenggaranya operasional dan pelatihan TIK Kepada Masyarakat Kecamatan Pringsurat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (M)	Kec. Pringsurat	1	paket	150.000.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000
<b>C</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>					<b>2.338.638.000</b>

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	Kab. Temanggung	4	keg.	125.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Kab. Temanggung	12	bulan	125.000.000	
		Terselenggaranya operasional dan pelatihan TIK Kepada Masyarakat Kecamatan Pringsurat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (M)	Kec. Pringsurat	1	paket	150.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	120.000.000	Usulan penambahan anggaran
<b>C</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>					<b>5.344.638.000</b>	



RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					1.543.638.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	IP	90.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	1100	Mpbs	1.453.638.000
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					795.000.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	70.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	paket	80.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					2.561.638.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	IP	108.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	1100	Mpbs	2.453.638.000	Usulan penambahan anggaran
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					2.783.000.000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	1.020.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	paket	230.000.000	Usulan penambahan anggaran

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	462	aplikasi	120.000.000		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	462	aplikasi	308.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	unit	180.000.000		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	unit	530.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	1	sistem	200.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	1	sistem	550.000.000	Usulan penambahan anggaran
		Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung,	Kab. Temanggung	12	bulan				Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung,	Kab. Temanggung	12	bulan	-	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	bulan	145.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	bulan	145.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>					245.000.000	D	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>					370.000.000	
1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					245.000.000	1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					370.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	5	dok.	180.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	5	dok.	255.000.000	Usulan penambahan anggaran
		Meningkatnya pemahaman penyajian data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	keg.				Meningkatnya pemahaman penyajian data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	keg.	-	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terwujudnya meta data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	dok.	15.000.000		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terwujudnya meta data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	dok.	50.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	keg.	50.000.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	keg.	65.000.000	Usulan penambahan anggaran
E	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>					125.000.000	E	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>					216.250.000	
1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					125.000.000	1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					216.250.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya sistem keamanan informasi	Kab. Temanggung	1	keg.	75.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya sistem keamanan informasi	Kab. Temanggung	1	keg.	101.250.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bu.	50.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bu.	115.000.000	Usulan penambahan anggaran
<b>JUMLAH</b>						<b>9.663.807.000</b>	<b>JUMLAH</b>						<b>14.459.057.000</b>	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.33  
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kecamatan Pringsurat	Terselenggaranya operasional dan pelatihan TIK Kepada Masyarakat Kecamatan Pringsurat Melalui Pusat Komunitas Kreatif	1 paket	150.000.000

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinkominfo Kabupaten Temanggung malakukan inovasi kerja yang dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan akses kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang sudah diterapkan dan sedang dalam persiapan untuk menunjang kinerja Dinkominfo adalah sebagai berikut:

### a. Pengelolaan Puskomkref

Pusat Komunitas Kreatif merupakan gedung yang difasilitasi dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperuntukkan khususnya bagi para UMKM dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan kreatifitas, memberi kemudahan dalam pencarian dan penyebaran informasi, serta mempercepat upaya perdagangan komoditas unggulan UMKM melalui *Business Online*. Sehingga melalui sarana ini para UKM dapat mengambil manfaat sehingga membantu transformasi dari manual bisnis menjadi *e-bisnis* yang merupakan faktor esensial dalam era bisnis masa depan yang memiliki daya saing tinggi.

Bidang Kominfo telah menjadwalkan setiap bulannya dengan mengadakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti, pembuatan blog, *website*, video promosi, belajar aplikasi

*office*, dan aplikasi lainnya, serta memberikan sertifikat pelatihan dan kartu member.

b. Implementasi sertifikat elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang diperlukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah dan cukup praktis karena kita tidak perlu membawa banyak materiil untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, namun cukup membawa sebuah token ataupun *dongle*.

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

c. *Mobile city branding*

Mobile city branding merupakan suatu media informasi dan pelayanan terpadu, yaitu sebuah portal informasi untuk publik yang dapat diakses terpadu satu platform, dari dalam (*internal*) atau luar (*eksternal*) bagi organisasi. Dengan platform informasi dan pelayanan publik yang terpadu, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan publik, potensi daerah, informasi pariwisata, dan informasi lainnya yang resmi dari pemerintah Kabupaten Temanggung.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat telah memaksa organisasi untuk membangun berbagai fasilitas teknologi sistem informasi sebagai tulang punggung utama dalam mengembangkan sebuah sistem informasi organisasi yang handal dan berkualitas. Salah satu tolok ukur kematangan pengembangan e\_government di suatu daerah adalah

---

dengan adanya layanan informasi dan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi, dengan menerapkan interoperabilitas antar sistem yang akan membantu proses pengumpulan informasi dan pelayanan antar OPD. Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan.

d. *E-statistik*

*E-statistik* adalah publikasi data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dalam bentuk digital yang yang dapat diakses untuk kepentingan pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan, disamping itu dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari informasi mengenai data statistik. Aplikasi ini terdiri dari dua jenis yaitu *e-statistik* berbasis web yang berisikan data-data statistik sektoral dalam bentuk rekapitulasi dan *e-statistik* yang berbasis android merupakan aplikasi mobile yang dapat diakses lewat *gadget* yang berisikan data-data statistik sektoral dari OPD, instansi vertikal dan instansi swasta dilingkup Kabupaten Temanggung.

Inovasi yang telah dilaksanakan dan sedang dalam persiapan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2020

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pengelolaan Puskomkr ef	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi UMKM	Pembuatan blog, website, video promosi, belajar aplikasi office, dan aplikasi lainnya, serta memberikan sertifikat pelatihan dan kartu member	Meningkatnya kemampuan dan kreatifitas, serta mempercepat upaya perdagangan komoditas unggulan UMKM melalui Bisnis Online	Dinkominfo -2019
2	Implementasi sertifikat elektronik	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan tanda tangan digital	Tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi	Efisiensi kinerja	Dinkominfo -2019
3	<i>Mobile city branding</i>	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Portal informasi publik	Portal informasi untuk publik yang dapat diakses terpadu	Kemudahan akses informasi	Dinkominfo -2019

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				terpadu	satu platform	publik	
4	<i>E-statistik</i>	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan Aplikasi statistik	Aplikasi statistik berbasis web	Kemudahan akses informasi statistik kabupaten	Dinkominfo-2019

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinkominfo terdapat 2 (dua) penghargaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	KIP Award	Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo Temanggung
2	Juara I Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng	Dinkominfo Prop. Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo Temanggung



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGAM, DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinkominfo Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinkominfo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kemenkominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024 disebutkan bahwa dalam mendukung kebijakan nasional Kemenkominfo fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*). Pandemi *Covid-19* yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor.

Arah kebijakan Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik;
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan;
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;

4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan;
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer;
6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah;
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kemenkominfo meliputi :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband Nasional*;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis ;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

---

Selanjutnya Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata TENTREM, MAREM, dan GANDEM. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.

---

Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Prinsip-prinsip *good governance* adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik yang *berkualitas* adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

*Misi* pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinkominfo Kabupaten Temanggung ada pada misi 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**, dimana urusan Dinkominfo diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang

---

pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari urusan komunikasi dan informatika adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”**. Sedangkan sasarannya adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran  
Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	3,25	3,50
			Nilai keterbukaan informasi publik	Point	79,50	80,00

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi public	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	18	20
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	25	30
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100	100
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	40	50
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	55	60
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	%	100	100
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	%	1	1



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.3  
Perbandingan Program dan Kegiatan  
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.513.807.000</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.142.639.510</b>	<b>1.628.832.510</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.595.169.000</b>	<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.594.981.510</b>	<b>- 187.490</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.999.900</b>	<b>- 1.00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.900	- 100
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.219.307.000</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.219.307.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.219.307.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.219.307.000	
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>157.362.000</b>	<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>157.307.010</b>	<b>- 54.990</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.650	- 2.350
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.997.500	- 2.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.200	- 800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.862.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.861.660	- 340
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.951.000	- 49.000

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>39.987.900</b>	<b>- 12.100</b>
	Pengadaan Mebel	20.000.000		Pengadaan Mebel	19.987.900	- 12.100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>103.500.000</b>	<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>103.390.300</b>	<b>- 109.700</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.400.000	- 100.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.995.300	- 4.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.995.000	- 5.000
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.989.400</b>	<b>- 10.600</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.996.600	- 3.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.992.800	- 7.200
<b>B</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>3.210.000.000</b>	<b>B</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>4.289.020.000</b>	<b>1.079.020.000</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.210.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.289.020.000</b>	<b>1.079.020.000</b>
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100.000.000		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	99.835.700	- 164.300
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	250.000.000		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	582.192.400	332.162.400
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.333.000.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.004.992.100	671.992.100
	Pelayanan Informasi Publik	152.000.000		Pelayanan Informasi Publik	152.000.000	
	Layanan Hubungan Media	50.000.000		Layanan Hubungan Media	125.000.000	

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100.000.000		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100.000.000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	125.000.000		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	124.999.800	- 200
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	
<b>C</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.338.638.000</b>	<b>C</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.788.638.000</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.543.638.000</b>	<b>1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.543.638.000</b>	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.453.638.000		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.453.638.000	
<b>2</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>795.000.000</b>		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.245.000.000</b>	<b>450.000.000</b>
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	70.000.000		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	370.000.000	300.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	80.000.000		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	230.000.000	150.000.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	120.000.000		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	120.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	180.000.000		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	180.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	200.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	200.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	145.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	145.000.000	
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>245.000.000</b>	<b>D</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>295.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>245.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>295.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	180.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	180.000.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.000.000		Membangun Metadata Statistik Sektoral	50.000.000	35.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	50.000.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	65.000.000	15.000.000
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>125.000.000</b>	<b>E</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>175.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>175.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	75.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	75.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	50.000.000

Dari Tabel 3.3. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 1.628.832.510,-. Kenaikan tersebut diperuntukkan untuk menunjang kegiatan desiminsasi informasi dan peningkatan jaringan internet Kabupaten Temanggung.

---

Tabel 3.4  
Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung  
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					3.595.169.000	3.513.806.866	3.217.794.266	3.121.352.354	97,00	3.954.685.900	
2 16 1 2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					4.999.900	-	5.000.000	4.996.600	99,93	5.500.000	
2 16 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Evaluasi Renstra, Pra-RKA, RKA, DPA, dan DPPA	Kab. Temanggung	7	dok	2.000.000	-	5.000.000	4.996.600	99,93	2.200.000	DAU
16 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya dokumen evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, RfK, IKPD, dan Data Pokok	Kab. Temanggung	26	dok	2.999.900	-	-	-	0	3.300.000	DAU
2 16 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					3.219.307.000	3.219.306.866	2.909.896.766	2.834.198.788	97,40	3.541.237.700	
2 16 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.219.307.000	3.219.306.866	2.909.896.766	2.834.198.788	97,40	3.541.237.700	DAU
2 16 1 2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					157.307.010	110.500.000	101.648.000	98.358.750	96,76	173.098.200	
2 16 1 2 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	9.997.650	10.000.000	8.200.000	7.897.500	96,31	11.000.000	DAU
2 16 1 2 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	19.997.500	-	-	-	0	22.000.000	DAU
2 16 1 2 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	bulan	2.999.200	-	-	-	0	3.300.000	DAU
2 16 1 2 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	14.861.660	14.500.000	14.000.000	13.993.200	99,95	16.348.200	DAU
2 16 1 2 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000	11.000.000	12.000.000	11.856.750	98,81	12.100.000	DAU
2 16 1 2 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	-	3.000.000	2.640.000	88	3.300.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 1 2 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	35.500.000	35.000.000	24.750.000	22.292.300	90,07	39.050.000	DAU
2 16 1 2 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	59.951.000	40.000.000	39.698.000	39.679.000	99,95	66.000.000	DAU
2 16 1 2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>39.987.900</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>44.000.000</b>	
2 16 1 2 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarpras mebeleur kantor	Kab. Temanggung	1	paket	19.987.900	-	-	-	0	22.000.000	DAU
2 16 1 2 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000	-	-	-	0	22.000.000	DAU
2 16 1 2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>103.500.000</b>	<b>119.000.000</b>	<b>99.399.500</b>	<b>95.300.579</b>	<b>95,88</b>	<b>113.850.000</b>	<b>DAU</b>
2 16 1 2 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.000.000	-	-	0	5.500.000	DAU
2 16 1 2 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	7.400.000	20.000.000	8.400.000	5.365.793	63,88	8.250.000	DAU
2 16 1 2 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	11.995.300	15.000.000	21.000.000	20.891.400	99,48	13.200.000	DAU
2 16 1 2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan terealisasinya pengadaan peralatan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	78.995.000	79.000.000	69.999.500	69.043.386	98,63	86.900.000	DAU
		Terbayarnya honorarium SS Tenaga Administrasi, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Kab. Temanggung	12	bulan							
		Terlaksananya servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan							
2 16 1 2	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>69.989.400</b>	<b>65.000.000</b>	<b>101.850.000</b>	<b>88.497.637</b>	<b>86,89</b>	<b>77.000.000</b>	
2 16 1 2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	59.996.600	55.000.000	71.350.000	60.520.792	84,82	66.000.000	DAU
2 16 1 2 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	9.992.800	10.000.000	30.500.000	27.976.845	91,73	11.000.000	DAU



KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	16	2				4.289.020.000	3.210.000.000	224.539.600	221.849.874	98,80	3.531.000.000					
2	16	2	2			4.289.020.000	3.210.000.000	224.539.600	221.849.874	98,80	3.531.000.000					
2	16	2	2	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	Kab. Temanggung	12	bulan	99.835.700	100.000.000		0	110.000.000	DAU	
2	16	2	2	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan perangkat multimedia produksi dan pengelolaan konten informasi, (Media Luar Ruang)	Kab. Temanggung	1	paket	582.192.400	250.000.000		0	275.000.000	DAU	
						Terlaksananya layanan komunikasi dan operasional melalui Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12	bulan				0	-		
2	16	2	2	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	3.044.992.100	2.333.000.000	80.856.800	80.812.668	99,95	2.566.300.000	DAU
2	16	2	2	6	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	152.000.000	152.000.000	92.359.400	89.735.876	97,16	167.200.000	DAU
2	16	2	2	7	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	Kab. Temanggung	3	keg.	125.000.000	50.000.000			0	55.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 2 2 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000	100.000.000	188.000	188.000	100	110.000.000	DAU
2 16 2 2 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Kab. Temanggung	12	bulan	124.999.800	125.000.000	44.066.400	44.044.330	99,95	137.500.000	DAU
2 16 2 2 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000	100.000.000	7.069.000	7.069.000	100	110.000.000	DAU
2 16 3	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>					<b>2.788.638.000</b>	<b>2.757.638.000</b>	<b>2.648.333.000</b>	<b>2.624.822.872</b>	<b>99,11</b>	<b>2.552.501.800</b>	
2 16 3 2	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.543.638.000</b>	<b>1.543.638.000</b>	<b>1.554.755.100</b>	<b>1.543.904.626</b>	<b>99,30</b>	<b>1.698.001.800</b>	
2 16 3 2 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	IP	90.000.000	90.000.000	67.995.800	60.576.000	89,09	99.000.000	DAU
2 16 3 2 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	700	Mpbs	1.453.638.000	1.453.638.000	1.486.759.300	1.483.328.626	99,77	1.599.001.800	DAU
2 16 3 2	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.245.000.000</b>	<b>1.214.000.000</b>	<b>1.093.577.900</b>	<b>1.080.918.246</b>	<b>98,84</b>	<b>854.500.000</b>	
2 16 3 2 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	70.000.000	370.000.000	82.866.800	82.854.730	99,99	77.000.000	DAU
2 16 3 2 4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	paket	80.000.000	230.000.000	1.271.500	1.271.500	100	88.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 3 2 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	462	aplikasi	120.000.000	120.000.000	305.180.200	294.895.422	96,63	132.000.000	DAU
2 16 3 2 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	unit	180.000.000	180.000.000	590.362.200	588.100.894	99,62	198.000.000	DAU
2 16 3 2 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	1	sistem	200.000.000	200.000.000			0	200.000.000	DAU
		Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung,	Kab. Temanggung	12	bulan							
2 16 3 2 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	bulan	145.000.000	145.000.000	113.897.200	113.795.700	99,91	159.500.000	DAU
2 20 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>					<b>245.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>239.806.200</b>	<b>239.011.508</b>	<b>99,67</b>	<b>420.000.000</b>	
2 20 2 2	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>245.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>239.806.200</b>	<b>239.011.508</b>	<b>99,67</b>	<b>420.000.000</b>	
2 20 2 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	5	dok.	180.000.000	180.000.000	203.229.700	203.193.100	99,98	320.000.000	DAU
2 20 2 2 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terwujudnya meta data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	dok.	15.000.000	50.000.000	-	-	0,00	45.000.000	DAU
2 20 2 2 6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	keg.	50.000.000	65.000.000	36.576.500	35.818.408	97,93	55.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2	21	2				125.000.000	175.000.000	46.333.550	45.489.502	98,18	137.500.000							
2	21	2	2			125.000.000	175.000.000	46.333.550	45.489.502	98,18	137.500.000							
2	21	2	2	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya sistem keamanan informasi	Kab. Temanggung	1	keg.	75.000.000	75.000.000	46.333.550	45.489.502	98,18	82.500.000	DAU		
2	21	2	2	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bu.	50.000.000	100.000.000	-	-	0,00	55.000.000	DAU		
<b>TOTAL</b>												<b>9.663.807.000</b>	<b>11.142.639.510</b>	<b>6.376.806.616</b>	<b>6.252.526.110</b>		<b>10.595.687.700</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Renja Dinkominfo Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinkominfo Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,39 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 98,60 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinkominfo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.142.639.510,- dengan komposisi belanja program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.594.981.510,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 4.289.020.000,-
3. Program Aplikasi Informatika Rp. 2.788.638.000,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 295.000.000,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 175.000.000,-

Selanjutnya Renja Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan bagi pembangunan pada urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dalam implementasinya tidak terlepas dari kaidah pelaksanaannya yaitu sebagai pedoman untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan pada tahun berjalan.

Perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung,      September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMSUL HADI, S.Sos., M.T  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606051986071002

---